

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu kriteria kinerja pemerintah yang menarik untuk kita amati adalah dari segi bagaimana mereka memperlakukan tata kelola keuangannya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Sudah bukan rahasia lagi bahwa masyarakat menganggap organisasi pemerintah sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi, hal itu dibuktikan dengan maraknya kasus penyalahgunaan anggaran yang seakan menjadi hal yang cukup lumrah yang terjadi baik di level pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, maka dari itu pemerintah dituntut untuk bisa memberi jaminan berupa informasi keuangan yang transparan dan akuntabel kepada semua pihak, baik itu pihak internal sendiri maupun pihak eksternal. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi, bukan tidak mungkin bahwa sistem pemerintahan *good governance* yang dicita-citakan akan terwujud. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik dari masyarakat sangatlah besar, mengingat peran dari pemerintah sangatlah penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pemerataan di setiap daerah. Menurut Mardiasmo (2018 : 18) pokok dan tujuan dari akuntansi sektor publik adalah :

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu **penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas**. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen

mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja.

Dengan diterbitkannya tiga undang-undang tentang keuangan negara, menjadi tanda seriusnya pemerintah dalam mereformasi penyelenggaraan keuangan negara yang mengharuskan entitas pemerintah daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya secara independen, salah satunya adalah pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, maka pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah, hal tersebut diatur dalam (UU No. 17 Tahun 2003) Tentang Keuangan Negara. Selanjutnya pada (UU No. 1 Tahun 2004) Tentang Perbendaharaan Negara, bahwasannya Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang dalam menetapkan kebijakan pengelolaan, pengendalian, bimbingan teknis, serta pelaksanaan sistem akuntansi pada pelaporan keuangan daerah. Lalu yang terakhir yaitu (UU No. 15 Tahun 2004) Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwasannya tanggung jawab keuangan negara merupakan kewajiban pemerintah untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yang kokoh demi terciptanya tata kelola yang efektif, efisien, transparan, serta penuh rasa keadilan. Maka dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang berwenang dalam membantu mewujudkan tata kelola yang diinginkan tersebut. BPK merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kinerja, salah satunya

adalah memeriksa tingkat kewajaran pada laporan keuangan pemerintah, yang selanjutnya akan menghasilkan opini serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam (PP No. 12 Tahun 2019) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaksudkan untuk memenuhi tiga hal mengenai tata kelola keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pengguna anggaran dalam hal ini wajib untuk memenuhi tiga hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terkait aktivitas keuangan yang telah terjadi pada periode yang bersangkutan (Abdul Hafiz Tanjung, 2015).

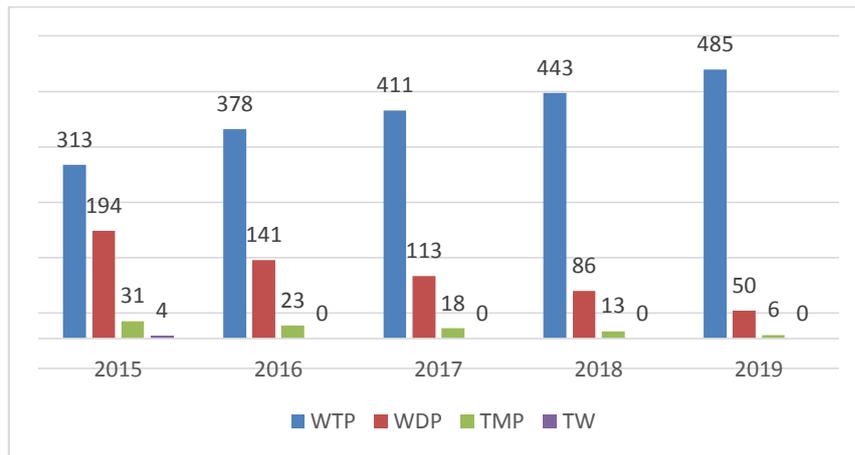
Fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik menurut (Mardiasmo, 2018) adalah sebagai pernyataan tegas bahwa organisasi tersebut telah dikelola dengan memenuhi fungsi kepatuhan dalam pengelolaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, fungsi akuntabilitas dan pelaporan retrospektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan fungsi perencanaan sebagai dasar dari kebijakan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan yang berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan agar pihak pengguna laporan tahu bahwa organisasi tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang sah dalam mengelola anggaran, karena salah satu ciri

pemerintahan yang baik terefleksikan dari bagaimana cara mengelola anggarannya.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah, beberapa diantaranya adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan berisikan tata cara penyajian akun/pos serta prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan sebuah laporan keuangan pemerintah, hal tersebut diatur dalam (PP No. 71 Tahun 2010) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya untuk mendukung terciptanya sebuah laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sebuah sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman bagi kepala satuan kerja untuk mengawasi, memantau, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi seperti yang diatur dalam (PP No. 60 Tahun 2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maka dari itu seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran dituntut untuk mempunyai komitmen, serta berperan aktif dalam penerapan nilai-nilai dari standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah.

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan merilis laporan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. BPK memberikan empat kriteria yang menjadi indikator dari tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, empat kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan informasi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Dari pemeriksaan tersebut BPK memberikan predikat berupa empat jenis opini berdasarkan tingkat kewajaran informasi. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti laporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji material berdasarkan dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan, maka entitas tersebut dianggap telah menyelenggarakan standar akuntansi yang berlaku umum dengan baik, disamping opini WTP terdapat pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), opini ini dikeluarkan apabila dalam keadaan tertentu auditor tersebut harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Kedua Opini wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti sebagian besar informasi dalam laporan keuangan terbebas dari salah saji material, kecuali untuk beberapa item tertentu yang menjadi pengecualian. Ketiga Opini Tidak Wajar (TW) yang berarti laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material, apabila auditor memberikan opini tidak wajar maka sudah dipastikan laporan keuangan tersebut diragukan kebenarannya, sehingga berpotensi menyesatkan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Keempat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang berarti auditor menolak untuk memberikan pendapat dikarenakan ketidakyakinan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Penerbitan opini ini didasari oleh anggapan bahwa ruang lingkup auditor dibatasi oleh pihak auditee sehingga menyulitkan auditor untuk mengumpulkan dan memperoleh bukti-bukti yang diperlukan (Bpkad.Banjarkab.go.id).



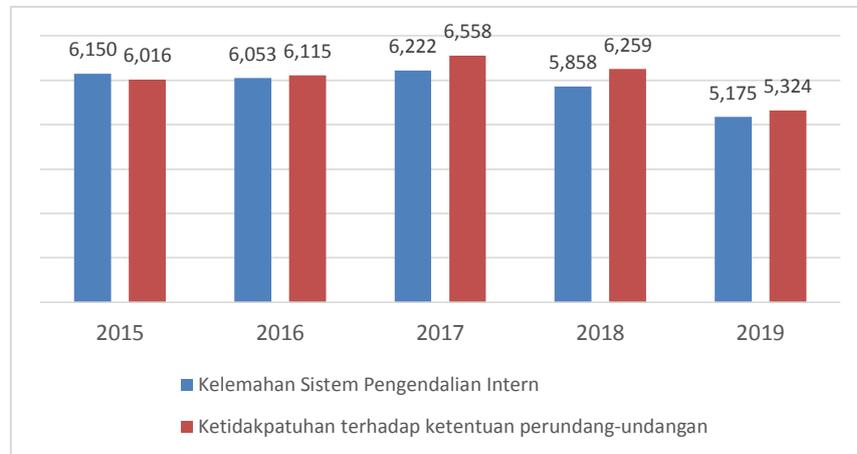
Sumber : bpk.go.id/IHPS I 2020(data diolah)

Gambar 1. 1

Opini BPK Terhadap LKPD Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, opini WTP berhasil diraih oleh seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia, dengan rincian 364 dari 415 pemerintah kabupaten (88%) dan 87 dari 93 pemerintah kota (94%). Capaian opini tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya raihan opini WTP sebesar 8% yaitu dari 82% pada tahun 2018 menjadi 90% pada tahun 2019. Dalam lima tahun terakhir hasil pemeriksaan BPK menunjukkan tren positif, dimana LKPD yang mendapatkan opini WTP bertambah sebanyak 32%, yaitu dari 58% pada LKPD 2015 menjadi 90% pada LKPD Tahun 2019, sementara itu untuk LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 4%, yaitu dari 5% pada LKPD Tahun 2015 menjadi hanya 1% pada LKPD Tahun 2019. Meskipun

menunjukkan tren positif, akan tetapi faktanya masih cukup banyak temuan permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



Sumber : bpk.go.id/IHPS I 2020 (data diolah)

Gambar 1. 2

Jumlah Permasalahan Dalam LKPD Tahun 2015-2019

Dalam perkembangannya jumlah permasalahan dalam LKPD Tahun 2015-2019 dapat dikatakan mengalami penurunan, hal tersebut dibuktikan pada gambar 1.2, yang mana pada LKPD Tahun 2019 jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut tentunya merupakan suatu pencapaian yang bagus dan harus diapresiasi, mengingat pengelolaan organisasi pemerintah memang bisa dikatakan cukup kompleks dikarenakan melibatkan banyak pihak, sehingga potensi kesalahan, penyimpangan dan kecurangan menjadi lebih besar. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya harus diperhatikan lebih seksama, mengingat nominal kerugian negara yang

ditimbulkan tidaklah sedikit. Maka dari itu seluruh entitas pemerintah daerah dalam hal ini wajib untuk terus membenahi tata kelola organisasi, khususnya dalam hal pengendalian intern dan komitmen aparatur pemerintah terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan guna meminimalisir tindakan kecurangan yang dapat merugikan negara.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 (IHPS I 2020), BPK mengungkapkan secara umum permasalahan pada laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan penyajian akun aset lancar, aset tetap, akun belanja dan sebagainya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak dilengkapi dengan bukti/dokumen yang memadai. Lalu kelemahan pada sistem pengendalian intern yang diakibatkan rendahnya kompetensi para penyelenggara akuntansi, belum optimalnya pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan retribusi, verifikasi anggaran pendapatan dan belanja yang disusun Tim Anggaran Pemerintah (TAD) dinilai kurang cermat, serta pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dinilai belum optimal. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang sebagian besar diakibatkan karena, pejabat yang berwenang tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, kepala satuan kerja kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bawahannya, pejabat yang berwenang dinilai kurang cermat dalam pengendalian anggaran pada unit kerjanya.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan

tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keandalan sebuah laporan keuangan. Fenomena mengenai permasalahan tersebut telah menimbulkan minat beberapa peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kinerja pemerintah untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah, yang tentunya dijadikan penulis sebagai referensi untuk melakukan penelitian serupa. Beberapa penelitian tersebut diantaranya :

1. (Siska Marini Pilander dkk., 2018) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Kotamobagu.
2. (Putu Cita Ayu & Ni Putu Ayu Kusumawati, 2020) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3. (Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti dkk., 2014) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan

kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4. (Daniel Kartika Adhi & Yohanes Suhardjo, 2013) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5. (Wiwi Idawati & Lia Eleonora, 2020) meneliti pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan nilai-nilai akuntabilitas secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi.
6. (Ahmad Faishol, 2016) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengujian unsur-unsur pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan.

7. (Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo, 2014) meneliti pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah I Bogor. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota wilayah I Bogor, sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif.
8. (Renny Novsellia Sihite & Holiawati, 2017) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
9. (Novtania Mokoginta dkk., 2017) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengujian unsur-unsur pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan yang dihasilkan, sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif.
10. (Iwan Satriawan dkk., 2016) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern, budaya organisasional dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian mengungkapkan

bahwa sistem pengendalian intern dan sumber daya manusia secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan budaya organisasional tidak.

11. (M. Ali Fikri dkk., 2015) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating pada SKPD pemprov NTB. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal, dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
12. (Astika Rahmawati dkk., 2018) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
13. (Carolus Askikarno P, 2020) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan pengujian unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

14. (Ni Putu Jesica Prastiwi & Ni Putu Sri Harta Mimba, 2018) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
15. (Wirmie Eka Putra, 2017) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi.
16. (Rasyidah Nadir & Hasyim, 2017) meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barru dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai variabel intervening. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi berbasis akrual, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

17. (Tuti Herawati, 2014) meneliti pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan pengujian unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
18. (Dariana & Jonase Oktavia, 2018) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai tingkat signifikansi 19%, sistem pengendalian intern mempunyai signifikansi 17,6%, Kompetensi staf akuntansi mempunyai tingkat signifikansi 12,5%, dan kualitas laporan keuangan mempunyai tingkat signifikansi 42,1%.
19. (I Made Hendrawan & Ni Ketut Rasmini, 2021) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kualitas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan di Universitas Udayana. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kualitas pegawai mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Universitas Udayana.
20. (Munasyir, 2015) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Aceh

Utara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Tabel 1. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Siska Marini Pilander dkk (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Kotamobogu	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern • Variabel dependen : kualitas laporan keuangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi • Lokasi penelitian pada pemerintah kota Kotamobogu 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “ <i>Goodwill</i> ” Vol 9, No 2, (2018) P-ISSN : 2088-8899 E-ISSN : 2715-1859
2.	Putu Cita Ayu & Ni Putu Ayu Kusumawati (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual,	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kompetensi sumber daya manusia • Lokasi penelitian pada pemerintah Kabupaten 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian	Widya Akuntansi dan Keuangan Vol 02, No 01 (2020) ISSN : 2655-9498

	kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah 	Gianyar	intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	
3.	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti dkk (2014). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kompetensi staf akuntansi • Lokasi penelitian pada SKPD Kabupaten Buleleng 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	<i>e-Journal</i> S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2, No 1 (2014)
4.	Daniel Kartika Adhi & Yohanes Suhardjo (2013). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tual	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan standar akuntansi pemerintahan • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel sistem pengendalian intern • Terdapat variabel kualitas aparatur pemerintah daerah • Lokasi penelitian pada pemerintah Kota Tual 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal STIE Semarang Vol 5, No 3, edisi Oktober (2013) ISSN : 2252-7826
5.	Wiwi Idawati & Lia Eleonora	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat 	Penerapan sistem	<i>Equity</i>

	(2020). Pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi	Sistem pengendalian intern • Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah	variabel penerapan standar akuntansi pemerintah • Terdapat variabel akuntabilitas keuangan • Lokasi penelitian pada pemerintah Kota Bekasi	pengendalian intern dan nilai-nilai akuntabilitas keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Vol 22, No 2, 153-172 (2020) P-ISSN : 0216-8545 E-ISSN : 2684-9739
6.	Ahmad Faishol (2016). Pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Lamongan	• Variabel independen : Sistem pengendalian intern • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan SKPD	• Tidak terdapat variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan • Lokasi penelitian pada SKPD Kabupaten Lamongan	Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) Vol 1, No 3 (2016) ISSN : 2502-3764
7.	Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo (2014). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten /kota di wilayah I Bogor	• Variabel independen : Pengaruh sistem pengendalian internal • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah	• Tidak terdapat variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan • Terdapat variabel kekuatan koersif • Lokasi penelitian pada pemerintah Kabupaten/ Kota	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif, sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 2, No 1, (2014), 276-288

		wilayah I Bogor			
8.	Renny Novsellia & Sihite Holliawati (2017). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kompetensi staf akuntansi • Lokasi penelitian pada SKPD Kota Tangerang Selatan 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Vol 9, No 2, 81-92 (2017) P-ISSN : 2086-2563 E-ISSN : 2541-0342
9.	Novtania Mokoginta dkk (2017). Sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Sistem pengendalian intern • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan • Terdapat variabel sistem akuntansi keuangan daerah • Lokasi penelitian pada BPKAD Bolaang Mongondow 	Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern berpengaruh negatif, sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Riset Akuntansi <i>Going Concern</i> Vol 12, No 2, 874-890 (2017)
10.	Iwan Satriawan dkk (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern, budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan sistem pengendalian intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel standar akuntansi pemerintahan 	Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern dan sumber daya	

	organisasional dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel budaya organisasi dan sumber daya manusia • Lokasi penelitian pada SKPD Kabupaten Sumbawa 	<p>an manusia berpengaruh signifikan, sedangkan budaya organisasional tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.</p>	<p>JAFFA</p> <p>Vol 04, No 1, Hal 18-29 (2016)</p>
11.	M Ali Fikri dkk (2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD Pemprov NTB dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern • Variabel dependen : kualitas laporan keuangan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kompetensi aparatur dan peran audit internal • Lokasi penelitian pada SKPD Pemprov NTB 	<p>Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.</p>	<p>Jurnal Ilmu Akuntansi. (Akuntabilitas)</p> <p>Vol 9, No 1 (2015)</p>
12.	Astika Rahmawati dkk (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern • Variabel dependen : kualitas laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel pemanfaatan teknologi informasi • Lokasi penelitian pada SKPD Kota Tangerang Selatan 	<p>Penerapan standar akuntansi pemerintahan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap</p>	<p>Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)</p> <p>Vol 20, No 2, (2018) pp.8-17</p>

	intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan	keuangan SKPD		kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	P-ISSN : 2715-6052 E-ISSN : 2715-6044
13.	Carolus Askikarno P (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : sistem pengendalian internal • Variabel dependen : kualitas laporan keuangan pada dinas PUPR 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel standar akuntansi pemerintahan • Lokasi penelitian pada Dinas PUPR Kabupaten Mamasa 	Pengujian unsur-unsur sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 4, No 2, Desember (2020) P-ISSN : 2528-2093 E-ISSN : 2528-1216
14.	Ni Putu Jesica Prastiwi dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Sistem pengendalian intern dan standar akuntansi berbasis akrual • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kompetensi sumber daya manusia • Lokasi penelitian pada BPKAD Provinsi Bali 	Penerapan sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan standar akuntansi berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 25, No. 2, Hal 1178-1204 (2018) ISSN : 2302-8556
15.	Wirmie Eka Putra (2017).	• Variabel independen :	• Terdapat variabel	Penerapan standar	Jurnal Riset

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi	<p>Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan Kota Jambi 	<p>kualitas sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada pemerintah Kota Jambi 	<p>akuntansi pemerintahan , sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.</p>	<p>Akuntansi Terpadu</p> <p>Vol 10, No. 2, Hal. 282-293, Oktober (2017)</p>
<p>16. Rasyidah Nadir dan Hasyim (2017). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barru dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai variabel intervening</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Penerapan standar akuntansi berbasis akrual • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia • Lokasi penelitian pada pemerintah Kabupaten Barru 	<p>Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi berbasis akrual, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan standar</p>	<p>AKUNTA-BEL</p> <p>Vol 14, No 1, Hal 57-68 (2017)</p>

				akuntansi berbasis akrual.	
17.	Tuti Herawati (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : sistem pengendalian internal • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel standar akuntansi pemerintahan • Lokasi penelitian pada OPD Pemda Cianjur 	Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan	<i>STAR – Study & Accounting Research</i> Vol 10, No. 2, (2014). ISSN : 1693-4482
18.	Dariana & Jonase Oktavia, (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal • Variabel dependen : kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kompetensi staf akuntansi • Lokasi penelitian pada satuan kerja peragkat daerah Kabupaten Bengkalis 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	<i>JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)</i> Vol 2, No. 1 Hal 77-105 (2018)
19.	I Made Hendrawan & Ni Ketut Rasmini (2021) Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kualitas pegawai terhadap kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel kualitas pegawai • Lokasi penelitian di Universitas Udayana 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kualitas pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan	<i>E-Journal Akuntansi Udayana</i> Vol. 31 No 5 Hal. 1331-1343 (2021) e-ISSN 2302-8556

	laporan keuangan			pada kualitas laporan keuangan di Universitas Udayana	
20.	Munasyir (2015) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern • Variabel dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada SKPD Kabupaten Aceh Utara 	Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Aceh Utara	Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala Vol 4 No. 4 Hal 23-35 (2015) ISSN 2302-0154

Arizal Basit Zulmira (2021)

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya 2021).

Sumber : Jurnal

Berdasarkan referensi dari jurnal-jurnal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada instansi pemerintah Kota Tasikmalaya. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan sebagai dasar penelitian adalah hasil pemeriksaan BPK berupa opini terhadap LKPD antara tahun 2015-2019 yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2
Opini BPK Terhadap LKPD Kota Tasikmalaya 2015-2019

Tahun Anggaran	Opini BPK
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : jabar.bpk.go.id, LHP LKPD (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, perkembangan opini BPK terhadap LKPD Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2015-2019 LKPD Kota Tasikmalaya mendapat predikat WTP empat kali berturut-turut yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2019, sedangkan LKPD Kota Tasikmalaya hanya mendapat satu predikat WDP yaitu pada tahun 2015 saja, tentunya hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menertibkan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerahnya. Meskipun menunjukkan citra yang positif, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPD Kota Tasikmalaya selama rentang waktu yang bersangkutan, diantaranya :

1. Temuan BPK dalam LKPD tahun 2017

Temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BHTB) sebesar Rp 108,4 juta, pembayaran Jasa Konsultasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 45,1 juta,

pertanggungjawaban atas belanja hibah Rp 2,29 miliar belum disampaikan, serta kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 608,3 juta. BPK menyebut permasalahan tersebut diakibatkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan dan pelaporan pertanggungjawaban yang kurang cermat (Kabarpriangan.com, 2018).

2. LHP-BPK atas penggunaan anggaran tahun 2018

Dari hasil audit BPK, ditemukan adanya anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp 4,269 miliar yang disebabkan karena adanya pengurangan volume dalam pengerjaan proyek infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan perbaikan jalan. Ketua Pansus DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada menjelaskan bahwa permasalahan tersebut diakibatkan karena rendahnya pengawasan dari kepala satuan kerja yang berada di lapangan, ditambah rekanan yang kurang profesional (Klikanggaran.com, 2019).

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengendalian dan pengawasan intern dan pelaporan pertanggungjawaban dapat menimbulkan celah dalam tata kelola keuangan daerah yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar dan berpotensi mengakibatkan distorsi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Perbaikan sistem pelaksanaan dan pelaporan keuangan, serta pengimplementasian SPI yang efektif, efisien dan berkelanjutan tentu merupakan salah satu dari banyaknya solusi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut, serta harus lebih diperhatikan tentunya sebagai penunjang pelaksanaan fungsi dan

kewajiban bagi aparat pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyelenggarakan pemerintahannya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan, penyimpangan dan tindakan kecurangan yang merugikan. Apabila hal tersebut dapat terlaksana, maka diharapkan predikat WTP pada laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya dapat dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya, sehingga citra dan integritas instansi di mata publik dapat terjaga.

Berdasarkan Permasalahan diatas, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah pada SKPD Kota Tasikmalaya merupakan hal yang cukup menarik untuk diamati, mengingat kedua hal tersebut merupakan faktor penting sebagai indikator keandalan sebuah laporan keuangan pemerintah, sehingga permasalahan tersebut sekiranya cukup layak untuk dijadikan sebagai dasar atas dibuatnya sebuah penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diklasifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Tasikmalaya ?

2. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Tasikmalaya ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Tasikmalaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Besar harapan dengan adanya penelitian ini dapat memberi sedikit pengetahuan bagi pihak yang sama-sama memiliki keterkaitan pada penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi penulis

Tentunya penelitian ini merupakan pencapaian tersendiri bagi penulis sebagai buah dari pemikiran dan dedikasi dalam menyusun penelitian ini. Besar harapan penelitian ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang.

2. Bagi pihak pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberi sedikit gambaran tentang pentingnya menjaga integritas publik, khususnya dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang harus disertai dengan penuh rasa tanggungjawab dan keadilan guna memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sedikit informasi yang sekiranya bisa dimanfaatkan sebagai referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan pustaka di universitas tempat saya menimba ilmu sekaligus sebagai sarana literatur bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan pada penelitian ini diselenggarakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang ditempuh penulis untuk menyusun skripsi ini berlangsung antara bulan Juni 2021 sampai dengan Maret 2022. Waktu penelitian secara lengkap dapat dilihat pada (lampiran 1).